



***ZAWAJ ‘URFĪ*: STUDI ATAS KONSEP WALI,
MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI
TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR**



HAIDAR ALI MAHMUD DESKY
NIM : 50124011



***ZAWAJ ‘URFĪ*: STUDI ATAS KONSEP WALI,
MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI
TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR**



HAIDAR ALI MAHMUD DESKY
NIM : 50124011

**ZAWAJ ‘URFĪ: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR,
DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB
HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
MESIR**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh

**Haidar Ali Mahmud Desky
NIM 50124011**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ZAWAJ ‘URFĪ: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR,
DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB
HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
MESIR**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh

**Haidar Ali Mahmud Desky
NIM 50124011**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag
197502111998032001**

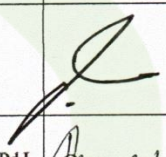
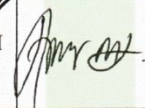
**Dr. Muhamad Rifa`I Subhi, S.Pd.I., M.Pd I
198907242020121010**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
NIM : 50124011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *ZAWAJ 'URFI*: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MADZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI MESIR

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag 197502111998032001		25-06-26
Pembimbing 2	Dr. Muhamad Rifa'i Subhi, S.Pd.I., M.Pd I 198907242020121010		29-06-26

Pekalongan, 25 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP 198210012023211016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ZAWAJ ‘URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN DALAM MAZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI MESIR” yang disusun oleh:

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
NIM : 50124011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 19821001 202321 1 016		
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag 19730506 200003 1 003		13/7/2026
Penguji Anggota	Dr. H. Mohmmad Fateh, M.Ag 19730903 200312 1 001		9-7-26



Direktur, 09 Juli 2026

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari para pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Haidar Ali Mahmud Desky
Haidar Ali Mahmud Desky

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan Tesis ini kepada:

1. Istri saya tercinta, Mariatul Ulfah sang motivator yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan support untuk suaminya dari semua segi, baik dari dukungan, perhatian, kasih sayang maupun dari sedoa dan motivasi. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya, serta semoga diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amiin.
2. Anak saya, Arfa Al Ghazi Mahmud Desky tercinta, yang selalu menemani Babah dalam suka dan duka selama menjalani proses kuliah hingga akhir. Semoga Allah memberikan tumbuh kembang yang baik dan semoga dijadikan anak yang solih dan berguna bagi umat.
3. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid, terkhusus dosen MHKI yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya, semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.
4. Seluruh sahabat dan teman-teman saya di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memotivasi serta memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya Tesis ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua, Amin.

ABSTRAK

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. *Zawaj 'Urfi*: Studi atas Konsep Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi dan Implikasi terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Mesir. Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. II. Dr. Muhamad Rifa'i Subhi, S.Pd.I., M.Pd I.

Kata Kunci: *Zawaj 'Urfi*, Mazhab Hanafi, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Zawaj 'urfi merupakan praktik perkawinan tidak tercatat yang berkembang di Mesir dan menimbulkan persoalan antara fikih dan pembuktian hukum dalam sistem negara. Dalam Mazhab Hanafi, akad nikah dapat dipandang sah apabila memenuhi unsur pokok akad, sedangkan pencatatan negara tidak menjadi syarat sah akad. Namun, perkawinan tidak tercatat berpotensi melemahkan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, yaitu konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi terkait *zawaj 'urfi*; faktor penyebab *zawaj 'urfi* dipilih sebagai alternatif perkawinan; serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi, faktor sosial-hukum yang melatarbelakangi praktik *zawaj 'urfi*, serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi bahan hukum dan data kontekstual. Data dianalisis menggunakan analisis isi, analisis hermeneutik, dan analisis sosio-legal kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi terhadap sebagian praktik *zawaj 'urfi*, tetapi tidak bersifat mutlak. Legitimasi tersebut tetap dibatasi oleh *kafa'ah*, perlindungan hak finansial perempuan, dan kebutuhan pembuktian hukum melalui pencatatan perkawinan. Praktik *zawaj 'urfi* dipengaruhi oleh tingginya biaya perkawinan, tuntutan mahar, pengangguran, urbanisasi, dan perubahan relasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *zawaj 'urfi* merupakan fenomena sosial-hukum yang berada di antara legitimasi fikih, legalitas negara, dan perlindungan perempuan serta anak.

ABSTRACT

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. *Zawaj 'urfi: A Study of the Concepts of Wali, Mahar, and Marital Publicity in the Hanafi School and Their Implications for the Protection of Women and Children in Egypt*. Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisors: (I) Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. (II) Dr. Muhamad Rifa'i Subhi, S.Pd.I., M.Pd I.

Keywords: *Zawaj 'urfi, Hanafi School, Marriage Registration, Protection of Women and Children.*

Zawaj 'urfi is an unregistered marriage practice that has developed in Egypt and raises issues between fiqh and legal proof within the state legal system. In the Hanafi School, a marriage contract may be considered valid if it fulfills the essential elements of the contract, while state registration is not regarded as a requirement for its validity. However, unregistered marriage has the potential to weaken the protection of women and children. This study addresses three main research questions: the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi School in relation to zawaj 'urfi; the factors that lead zawaj 'urfi to be chosen as an alternative form of marriage; and its implications for the protection of women and children in Egypt.

This study aims to analyze the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi School, the socio-legal factors underlying the practice of zawaj 'urfi, and its implications for the protection of women and children. This research is normative-juridical legal research with a qualitative approach. Data were collected through library research and documentary study. Data validity was examined through the triangulation of legal materials and contextual data. The data were analyzed using content analysis, hermeneutic analysis, and contextual socio-legal analysis.

The findings show that the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi School provide legitimacy for certain practices of zawaj 'urfi, but such legitimacy is not absolute. This legitimacy remains limited by kafā'ah, the protection of women's financial rights, and the need for legal proof through marriage registration. The practice of zawaj 'urfi is influenced by the high cost of marriage, mahar demands, unemployment, urbanization, and changes in social relations. This study concludes that zawaj 'urfi is a socio-legal phenomenon situated between fiqh legitimacy, state legality, and the protection of women and children.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul **“Zawaj ‘Urft: Studi atas Konsep Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Mesir”** ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan umatnya.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan disamping berkat rahmat Allah SWT, juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih atas segala saran, bimbingan, dan motivasinya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag., selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, kritik serta masukan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhamad Rifa'I Subhi, S.Pd.I., M.Pd I., selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan serta diskusi sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.

6. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan arahan.
7. Segenap jajaran dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya dosen jurusan Magister Hukum Keluarga Islam yang ikhlas, tulus, dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berintelektual.
8. Ibu, Bapak dan segenap keluarga tercinta yang banyak berkorban demi keberhasilan penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberi semangat tanpa henti kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari seluruh fakultas yang banyak berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis terkait penulisan tugas akhir. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi, baik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, akademisi, maupun para pembuat kebijakan dalam upaya menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori.....	10

2.1.1	Teori <i>Fiqh al-Munākahāt</i> Mazhab Hanafi.....	10
2.1.2	Teori <i>Qawā'id al-Fiqhiyyah</i>	18
2.1.3	<i>Fiqh al-Wāqi'</i>	25
2.2	Penelitian Terdahulu	28
2.3	Kerangka Berfikir	49
BAB III		52
METODE PENELITIAN		52
3.1	Desain Penelitian	52
3.2	Pendekatan Penelitian.....	54
3.3	Data dan Sumber Bahan Hukum	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.5	Teknik Keabsahan Data	60
3.6	Teknik Analisis Data.....	62
3.7	Teknik Penarikan Simpulan.....	64
BAB IV		66
GAMBARAN UMUM PENELITIAN		66
4.1	Gambaran Umum Negara Mesir.....	66
4.1.1	Letak Geografis dan Persebaran Penduduk Mesir.....	67
4.1.2	Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Mesir.....	69
4.1.3	Sistem Politik, Hukum Keluarga, dan Administrasi Perkawinan Mesir	71
4.2	Sejarah dan Perkembangan <i>Zawaj 'Urfi</i> di Mesir	74
4.2.1	Sejarah Kemunculan <i>Zawaj 'Urfi</i> di Mesir	75
4.2.2	Faktor-Faktor Penyebab Maraknya <i>Zawaj 'Urfi</i>	77
4.3	Kedudukan Mazhab Hanafi dan Hukum Positif Mesir dalam Kajian <i>Zawaj 'urf</i>	82

4.3.1	Kedudukan Mazhab Hanafi dalam Sistem Hukum Keluarga Mesir	82
4.3.2	Kedudukan Hukum Positif Mesir dalam Pengaturan Perkawinan Tidak Tercatat	83
4.3.3	Administrasi Perkawinan dan Peran Peradilan.....	84
BAB V		86
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		86
5.1	Ruang Lingkup Data Penelitian.....	86
5.2	Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan	88
5.2.1	Data tentang Wali dalam Mazhab Hanafi	88
5.2.2	Data tentang Mahar dalam Mazhab Hanafi.....	90
5.2.3	Data tentang Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi	91
5.3	Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak Tercatat	94
5.3.1	Pencatatan Perkawinan dan Peran <i>Ma'dhūn</i>	95
5.3.2	Pembuktian Perkawinan dalam Qānūn 1931 dan Qānūn No. 1 Tahun 2000	96
5.3.3	Peran <i>Mahākim al-Usrah</i> dalam Sengketa <i>Zawaj 'urfī</i>	99
5.4	Data Praktik <i>Zawaj 'urfī</i> di Mesir	102
5.4.1	Faktor Sosial-Ekonomi dan Praktik <i>Zawaj 'urfī</i>	102
5.4.2	<i>Taşādūq al-Zawāj</i> sebagai Legalisasi Administratif... ..	103
5.4.3	<i>Ithbāt al-Zawāj, Taṭlīq, dan Fasakh</i> dalam Sengketa <i>Zawaj 'urfī</i>	104
5.5	Implikasi <i>Zawaj 'urfī</i> terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	106
5.5.1	Perlindungan Perempuan: Mahar, Nafkah, Perceraian, dan Waris	106

5.5.2	Perlindungan Anak: Nasab, Nafkah, Waris, dan Pencatatan Kelahiran	108
5.5.3	Keterbatasan Perlindungan Hukum dalam Praktik.....	109
5.6	Data Hasil Wawancara.....	110
5.6	Temuan Penelitian	113
BAB VI.....		117
PEMBAHASAN.....		117
6.1	<i>Zawaj ‘urfī</i> dalam Perspektif Fikih.....	117
6.1.1	Konsep Wali dan Legitimasi <i>Zawaj ‘Urfī</i>	118
6.1.2	Konsep Mahar dan Faktor Ekonomi <i>Zawaj ‘Urfī</i>	119
6.1.3	Konsep Publisitas dan Problem Pembuktian Perkawinan 120	
6.1.4	Batas Legitimasi Fikih Hanafī terhadap <i>Zawaj ‘Urfī</i> .	121
6.2	<i>Zawaj ‘urfī</i> dalam Perspektif <i>Qawā‘id al-fiqhiyyah</i>	122
6.2.1	Kaidah <i>al-‘Ādah Muḥakkamah</i> dalam Praktik <i>Zawaj ‘Urfī</i> 123	
6.2.2	Kaidah <i>Dar’ al-Mafāsīd Awlā min Jalb al-Maṣāliḥ</i> ...	124
6.2.3	Kaidah <i>Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra‘iyyah manūṭ bi al-Maṣlaḥah</i>	125
6.3	<i>Zawaj ‘urfī</i> dalam Perspektif <i>Fiqh al-Wāqī</i> ‘	127
6.3.1	Keterkaitan Hukum dengan Realitas Sosial Mesir	127
6.3.2	Pencatatan Perkawinan sebagai Kebutuhan Hukum Modern 129	
6.3.3	Peran <i>Ma’dhūn</i> dan <i>Mahākīm al-Usrah</i> sebagai Mekanisme Korektif	131
6.3.4	Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Orientasi Hukum Keluarga.....	132

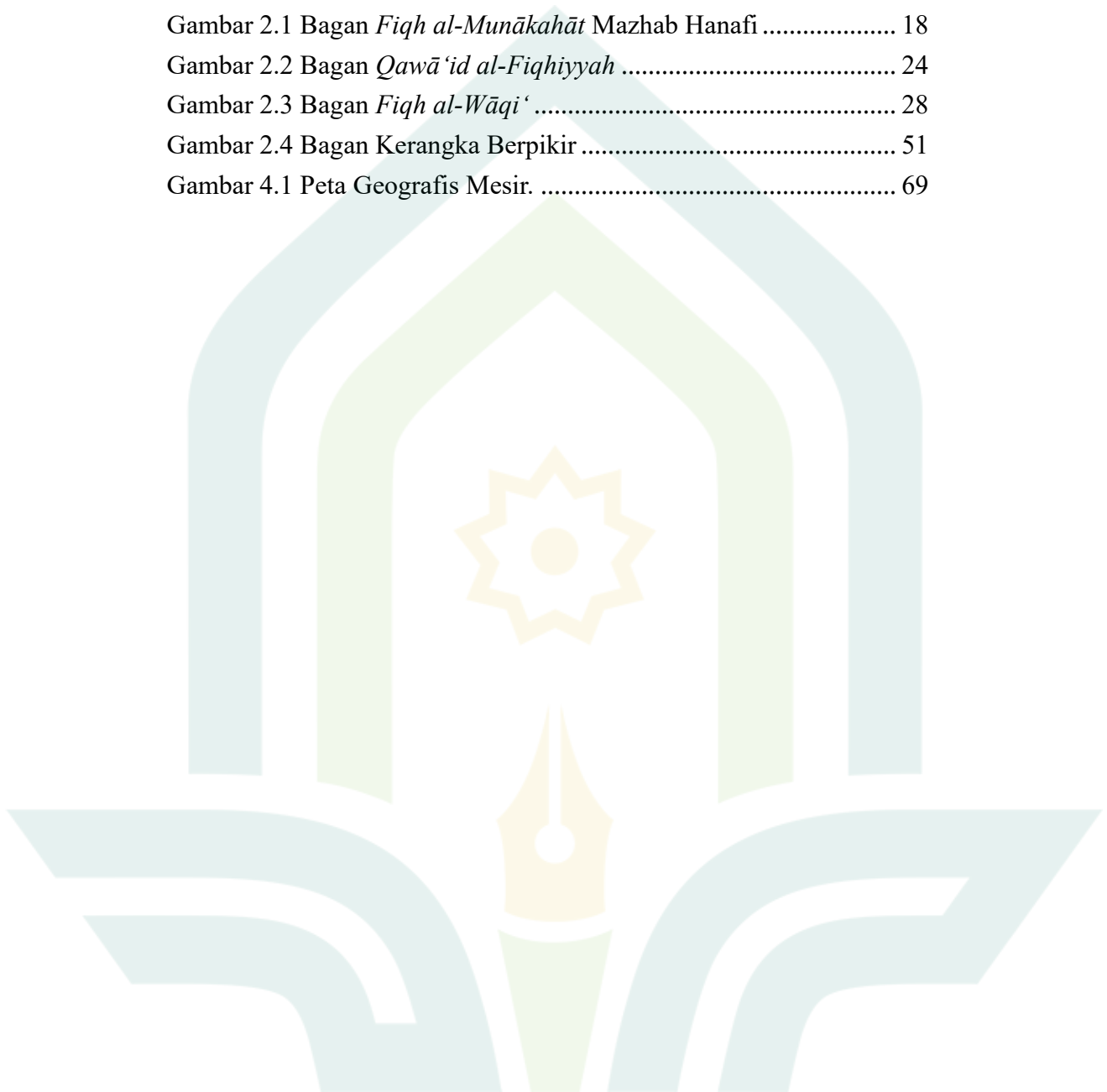
6.4	Sintesis Analisis: Legitimasi Fikih, Legalitas Negara, dan Perlindungan Perempuan-Anak.....	133
6.5	Kebaruan dan Kontribusi Penelitian.....	136
6.5.1	Kebaruan Penelitian.....	136
6.5.2	Kontribusi Teoretis	137
6.5.3	Kontribusi Praktis	138
BAB VII		140
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN		140
7.1	Simpulan.....	140
7.2	Implikasi	142
7.2.1	Implikasi Teoretis	142
7.2.3	Implikasi Praktis	143
7.3	Keterbatasan Penelitian	144
7.4	Saran	144
DAFTAR PUSTAKA		147
LAMPIRAN LAMPIRAN		151
TRANSKIP WAWANCARA		154
DOKUMENTASI GAMBAR		157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4.1 Geografi dan Karakter Demografis Mesir	68
Tabel 4.2 Sistem Hukum Keluarga dan Administrasi Perkawina. Mesir.	73
Tabel 4.3 Sejarah Perkembangan <i>Zawaj 'Urfi</i> di Mesir	76
Tabel 4.4 Faktor Penyebab Maraknya <i>Zawaj 'Urfi</i> di Mesir.....	81
Tabel 5.2 Data Fikih Hanafi tentang Wali, Mahar, dan Publisitas Perkawinan.....	93
Tabel 5.3 Data Hukum Positif Mesir tentang Perkawinan Tidak Tercatat	101
Tabel 5.4 Data Praktik <i>Zawaj 'Urfi</i> dan Mekanisme Korektif dalam Sistem Hukum Mesir	105
Tabel 5.5 Implikasi <i>Zawaj 'Urfi</i> terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	112
Tabel 6.1 Sintesis Analisis <i>Zawaj 'Urfi</i> di Mesir.....	135

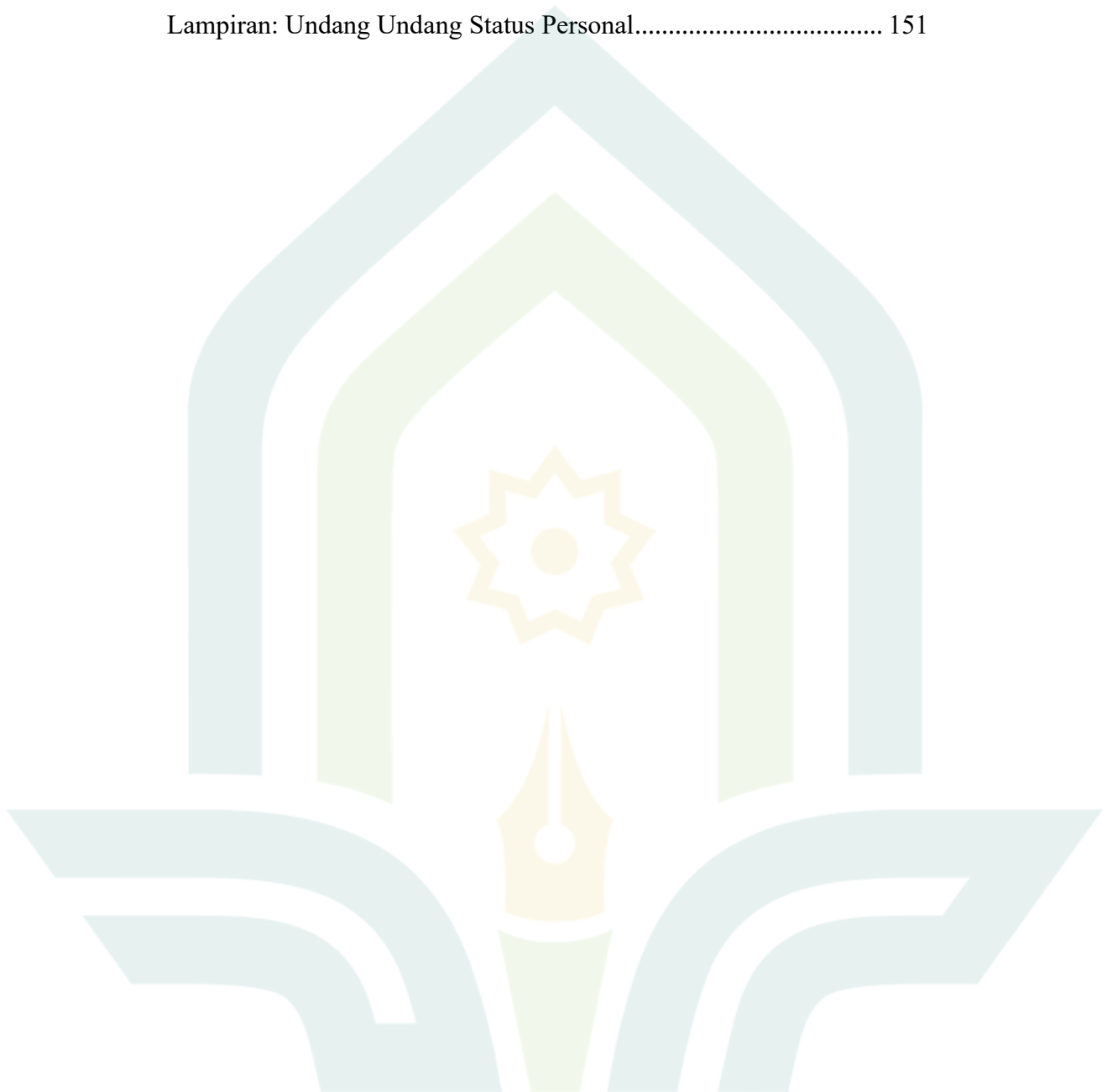
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan <i>Fiqh al-Munākahāt</i> Mazhab Hanafi	18
Gambar 2.2 Bagan <i>Qawā'id al-Fiqhiyyah</i>	24
Gambar 2.3 Bagan <i>Fiqh al-Wāqi'</i>	28
Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir	51
Gambar 4.1 Peta Geografis Mesir.	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Undang Undang Status Personal.....	151
--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zawaj 'urfi merupakan salah satu fenomena penting dalam perkembangan hukum keluarga Mesir kontemporer. Secara umum, *zawaj 'urfi* dipahami sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur dasar akad nikah, tetapi tidak dicatat secara resmi dalam administrasi negara. Dalam praktiknya, *zawaj 'urfi* dapat dilakukan melalui dokumen tertulis nonresmi, kesepakatan privat, atau bentuk akad yang diketahui secara terbatas oleh para pihak. Karena tidak dicatat secara resmi, *zawaj 'urfi* sering berada pada posisi antara legitimasi keagamaan dan keterbatasan pembuktian dalam hukum negara (quality & Family, t.t.; Sonneveld, 2012; Voorhoeve, 2012).

Fenomena *zawaj 'urfi* di Mesir tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya resepsi, pengangguran, urbanisasi, serta kontrol keluarga terhadap relasi laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih jalur perkawinan informal. Dalam konteks tertentu, *zawaj 'urfi* dipandang sebagai alternatif perkawinan yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan resmi. Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi hukum yang serius karena perkawinan yang tidak tercatat tidak selalu memperoleh pengakuan administratif yang memadai dari negara (Al-Sharmani, 2017; Shahrani, 2010).

Dalam perspektif fikih, khususnya Mazhab Hanafi, terdapat sejumlah konsep yang sering dikaitkan dengan praktik *zawaj 'urfi*, yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Mazhab Hanafi memiliki karakteristik tertentu dalam memandang kecakapan hukum perempuan dalam akad nikah. Perempuan yang telah balig dan berakal pada dasarnya dipandang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad nikah sendiri dalam kondisi tertentu, meskipun tetap

terdapat pembahasan mengenai *kafā'ah* dan perlindungan keluarga. Al-Sarakhsi dalam *al-mabsūt* menjelaskan bahwa akad nikah memiliki konsekuensi hukum selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih, termasuk adanya ijab-qabul dan saksi (Al-Sarakhsi, 1993; 'Ābidīn, 2011; Kāsānī, 1986).

Konsep mahar dalam Mazhab Hanafi juga menunjukkan adanya fleksibilitas. Mahar merupakan hak finansial perempuan dalam perkawinan, tetapi penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat sah akad. Apabila mahar tidak disebutkan secara eksplisit, perempuan tetap berhak memperoleh *mahr al-misl* sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah. Fleksibilitas ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah perkawinan dan menjaga hak perempuan. Namun, dalam praktik *zawaj 'urfī*, kelonggaran mengenai mahar dapat disalahgunakan untuk mengurangi tanggung jawab finansial laki-laki atau melemahkan posisi perempuan ketika terjadi sengketa perkawinan (Al-Sarakhsi, 1993; 'Ābidīn, 2011).

Selain wali dan mahar, aspek publisitas perkawinan juga menjadi isu penting. Dalam fikih Hanafi, keberadaan saksi menjadi unsur penting dalam akad nikah, sedangkan publisitas atau *i'lān al-nikāh* lebih dipahami sebagai sarana sosial untuk mencegah tuduhan, sengketa, dan kerahasiaan yang dapat merugikan para pihak. Perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi meskipun dihadiri saksi dapat menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan. Dalam konteks *zawaj 'urfī*, lemahnya publisitas dan tidak adanya pencatatan resmi memperbesar risiko kerentanan perempuan dan anak, karena hubungan perkawinan sulit dibuktikan di hadapan lembaga negara (Al-Sarakhsi, 1993; Sonneveld, 2012).

Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam pengakuan administratif dan perlindungan hukum keluarga. Qānūn No. 1 Tahun 2000, khususnya Pasal 17, menunjukkan bahwa perkara perkawinan yang diajukan ke pengadilan membutuhkan bukti tertulis tertentu. Ketentuan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menilai sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi untuk memastikan bahwa

hubungan perkawinan dapat dibuktikan dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, muncul ketegangan antara legitimasi fikih yang menilai akad dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan legalitas administratif negara yang menuntut pencatatan dan pembuktian tertulis (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17), (Bernard-Maugiron, 2023),

Ketentuan mengenai pembuktian perkawinan tersebut juga melahirkan mekanisme *ithbāt al-zawāj* sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perkawinan tidak tercatat memperoleh pengakuan di hadapan pengadilan. Melalui mekanisme ini, keberadaan hubungan perkawinan dapat dibuktikan sehingga para pihak memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajibannya. Namun demikian, proses *ithbāt al-zawāj* tidak selalu mudah karena bergantung pada kemampuan para pihak menghadirkan alat bukti yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan sejak awal berpotensi menimbulkan hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

Ketegangan antara legitimasi fikih dan legalitas administratif negara tersebut menimbulkan dampak yang nyata terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Perempuan yang menjalani *zawaj 'urfi* berpotensi mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak atas mahar, nafkah, tempat tinggal, pengajuan perceraian, pembagian harta, hak waris, maupun pengakuan status perkawinan apabila tidak memiliki bukti tertulis yang memadai. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan tidak adanya pembuktian akan menghadapi persoalan pembuktian nasab, dan juga dapat mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, hak nafkah, hak waris, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya, serta akses terhadap berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu, persoalan *zawaj 'urfi* tidak lagi hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut fikih, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum.

Human Rights Watch juga menunjukkan bahwa lemahnya pembuktian hubungan keluarga dan keterbatasan administrasi hukum menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Mesir (Emma Anderson, t.t.)

Dalam praktik peradilan keluarga Mesir, persoalan *zawaj 'urfi* tidak selalu dapat diselesaikan secara sederhana. Di satu sisi, terdapat konstruksi fikih yang dapat memberi ruang keabsahan terhadap akad nikah tertentu selama memenuhi syarat dasar. Di sisi lain, pengadilan negara membutuhkan bukti tertulis dan dokumen administratif untuk memberikan perlindungan hukum. Ketika perempuan tidak memiliki dokumen yang cukup, akses terhadap hak-hak keluarga menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, persoalan *zawaj 'urfi* tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sah menurut fikih, tetapi juga harus dibaca dalam kerangka perlindungan hukum, kepastian administratif, dan realitas sosial masyarakat Mesir (Alim, 2016; Al-Sharmani, 2017).

Meskipun penelitian ini berfokus pada praktik *zawaj 'urfi* di Mesir, hasil penelitian memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Fenomena perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih menjadi salah satu persoalan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut hukum Islam, tetapi juga menyangkut pembuktian perkawinan melalui mekanisme isbat nikah, pemenuhan hak nafkah, pembagian waris, penerbitan akta kelahiran, serta kepastian status hukum perempuan dan anak. Pengalaman hukum keluarga Mesir dalam mengelola hubungan antara legitimasi fikih dan legalitas administratif memberikan perspektif komparatif yang penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hak-hak anggota keluarga.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas *zawaj 'urfi* dari sudut pandang sosial, antropologi, hukum positif, maupun praktik perkawinan tidak tercatat. Namun, belum banyak penelitian

yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis fikih Mazhab Hanafi mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan dengan hukum keluarga Mesir melalui pendekatan *socio-legal* untuk menjelaskan implikasi praktik *zawaj 'urfi* terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, kajian yang mengaitkan pengalaman hukum keluarga Mesir dengan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia juga masih terbatas. Celah inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dan ruang kontribusi akademik penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi *zawaj 'urfi* menurut fikih Mazhab Hanafi, pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir, serta implikasi hukum dan sosialnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga, baik dalam konteks Mesir maupun sebagai bahan pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa persoalan utama sebagai berikut:

1. Adanya ketegangan antara fikih Mazhab Hanafi dan hukum positif Mesir dalam pengaturan perkawinan.

Fikih Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam beberapa aspek perkawinan, terutama terkait wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Kelonggaran tersebut secara normatif dapat menjadi dasar legitimasi bagi sebagian praktik *zawaj 'urfi*. Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan resmi dan bukti tertulis sebagai unsur penting dalam pengakuan hukum terhadap perkawinan. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan antara keabsahan agama dan legalitas administratif negara.

2. Berkembangnya praktik *zawaj 'urfi* sebagai alternatif perkawinan bagi sebagian masyarakat Mesir.

Zawaj 'urfi berkembang karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan administratif. Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, pengangguran, kebutuhan tempat tinggal, kontrol keluarga, serta norma sosial yang membatasi relasi laki-laki dan perempuan mendorong sebagian pasangan memilih perkawinan informal. Praktik ini dipandang lebih mudah dan cepat, tetapi berpotensi menimbulkan masalah hukum karena tidak selalu tercatat secara resmi.

3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik *zawaj 'urfi*.

Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan perempuan berpotensi mengalami kesulitan dalam menuntut nafkah, mahar, tempat tinggal, perceraian, dan waris. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga berpotensi menghadapi kesulitan dalam pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, hak nafkah, hak waris, dan perlindungan administratif lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa *zawaj 'urfi* tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan akad, tetapi juga persoalan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan tidak melebar dari tujuan yang telah ditetapkan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Objek kajian normatif

Kajian normatif dalam penelitian ini dibatasi pada tiga konsep utama dalam *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan atau *i'lān al-nikāh*. Ketiga konsep tersebut dikaji untuk melihat sejauh mana konstruksi fikih Hanafi memberikan legitimasi, batasan, atau kritik terhadap praktik *zawaj 'urfi*. Rujukan

utama dalam kajian ini adalah kitab *al-mabsūt* karya Imam al-Sarakhsi dan literatur fikih Hanafi lain yang relevan.

2. Objek kajian yuridis dan kontekstual

Kajian yuridis dan kontekstual dalam penelitian ini dibatasi pada praktik *zawaj 'urfī* di Mesir serta pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir. Pembahasan meliputi ketentuan hukum positif mengenai pencatatan perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan, penyelesaian sengketa keluarga, serta peran *Mahākim al-Usrah* dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan secara luas di Mesir. Penelitian berfokus pada kajian yuridis-normatif melalui bahan hukum, literatur akademik, statistik, dan kajian terdahulu yang relevan. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur terhadap dua warga negara Mesir sebagai data pendukung (*supporting data*) guna mengonfirmasi temuan penelitian mengenai praktik *zawaj 'urfī* dalam masyarakat Mesir.

3. Objek kajian perlindungan hukum

Kajian implikasi dalam penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik *zawaj 'urfī*. Perlindungan perempuan mencakup hak mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, dan waris. Perlindungan anak mencakup pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian status hukum. Penelitian ini tidak membahas secara luas seluruh aspek sosial-ekonomi *zawaj 'urfī*, kecuali yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum perempuan dan anak.

4. Perspektif analisis

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu *fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqī'*. *Fiqh al-munākahāt* Mazhab Hanafi digunakan untuk membaca dasar normatif mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan. *Qawā'id al-*

fiqhiyyah digunakan untuk menilai maslahat, mafsadat, dan peran kebijakan negara dalam perlindungan hukum. *Fiqh al-wāqī* digunakan untuk membaca praktik *zawaj ‘urfī* dalam konteks realitas sosial masyarakat Mesir modern.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan praktik *zawaj ‘urfī* di Mesir?
2. Mengapa *zawaj ‘urfī* dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir?
3. Bagaimana implikasi *zawaj ‘urfī* terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta kaitannya dengan praktik *zawaj ‘urfī* di Mesir.
2. Menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang menyebabkan *zawaj ‘urfī* dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir.
3. Menganalisis implikasi *zawaj ‘urfī* terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir, khususnya terkait hak mahar, nafkah, perceraian, waris, nasab, pencatatan kelahiran, dan kepastian hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam,

khususnya mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta relevansinya terhadap praktik *zawaj 'urfi* di Mesir.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami hubungan antara legitimasi fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan hukum terhadap perempuan serta anak dalam praktik perkawinan tidak tercatat.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan kajian perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain, termasuk Indonesia, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas administratif.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik perkawinan tidak tercatat.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai *zawaj 'urfi*, nikah siri, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai *zawaj 'urfī* dalam kaitannya dengan konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi memiliki hubungan penting dengan praktik *zawaj 'urfī* di Mesir. Dalam konsep wali, Mazhab Hanafi memberikan ruang kecakapan hukum kepada perempuan yang telah balig dan berakal untuk melakukan akad nikah dalam kondisi tertentu. Kelonggaran ini menjadi salah satu dasar mengapa sebagian praktik *zawaj 'urfī* dapat memperoleh legitimasi keagamaan, khususnya ketika akad dilakukan oleh para pihak yang dianggap cakap hukum dan dihadiri saksi. Namun, kelonggaran tersebut tidak bersifat mutlak karena Mazhab Hanafi tetap memperhatikan prinsip *kafā'ah* dan hak wali untuk melakukan keberatan apabila perkawinan menimbulkan mudarat bagi perempuan.

Dalam konsep mahar, Mazhab Hanafi memandang mahar sebagai hak finansial perempuan yang tetap wajib dipenuhi, meskipun penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat sah akad. Fleksibilitas ini dapat memudahkan perkawinan, tetapi dalam praktik *zawaj 'urfī* dapat menimbulkan kerentanan apabila mahar tidak dicatat atau tidak memiliki bukti yang kuat. Adapun dalam konsep publisitas, Mazhab Hanafi menempatkan saksi sebagai unsur penting dalam akad nikah dan sebagai bentuk minimal dari penampakan akad. Namun, dalam konteks negara modern, keberadaan saksi saja belum tentu cukup untuk memberikan perlindungan hukum apabila perkawinan tidak dicatat secara resmi. Dengan demikian, konsep wali, mahar, dan publisitas dalam Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi

terhadap sebagian praktik *zawaj 'urfi*, tetapi tetap memiliki batas ketika praktik tersebut menimbulkan kerugian hukum bagi perempuan dan anak.

2. *Zawaj 'urfi* dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan administratif. Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya resepsi, penyediaan perabot rumah tangga, pengangguran, urbanisasi, serta perubahan pola relasi sosial generasi muda menjadi faktor yang mendorong sebagian pasangan memilih *zawaj 'urfi*. Dalam sebagian masyarakat Mesir, *zawaj 'urfi* dipandang sebagai jalan yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan formal yang membutuhkan kesiapan ekonomi dan keterlibatan keluarga secara luas.

Selain faktor ekonomi, *zawaj 'urfi* juga berkembang karena adanya ketegangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Sebagian masyarakat memahami bahwa akad yang memenuhi unsur dasar fikih, seperti ijab-qabul dan saksi, sudah cukup untuk memberi legitimasi keagamaan. Namun, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan dan bukti tertulis sebagai unsur penting dalam pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena itu, *zawaj 'urfi* muncul sebagai praktik yang berada di antara pengakuan fikih, kebutuhan sosial, dan keterbatasan administratif. Praktik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan sosial-ekonomi yang berkembang dalam masyarakat Mesir modern.

3. Implikasi *zawaj 'urfi* terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir sangat signifikan. Perempuan merupakan pihak yang paling rentan karena perkawinan yang tidak dicatat dapat menyulitkan pembuktian status sebagai istri. Kesulitan tersebut berdampak pada hak mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, dan waris. Meskipun secara fikih perempuan tetap memiliki hak atas mahar dan nafkah, dalam praktik hukum negara hak-hak tersebut membutuhkan pembuktian yang kuat. Ketika

perkawinan tidak memiliki dokumen resmi, perempuan dapat mengalami hambatan dalam mengakses perlindungan hukum.

Anak yang lahir dari *zawaj 'urfī* juga berpotensi mengalami kerentanan hukum. Kerentanan tersebut terutama berkaitan dengan pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian status hukum. Dalam kondisi tertentu, hukum Mesir memang memberi ruang perlindungan melalui pembuktian tertulis, gugatan nasab, *taṣādūq al-zawāj*, *ithbāt al-zawāj*, *taṭlīq*, dan *fasakh*. Namun, mekanisme tersebut tetap bergantung pada ketersediaan bukti dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk mengakses lembaga peradilan. Dengan demikian, *zawaj 'urfī* tidak cukup dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sahnya akad menurut fikih, tetapi harus dipahami sebagai persoalan perlindungan hukum keluarga.

7.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoretis, yuridis, maupun praktis.

7.2.1 Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tentang *zawaj 'urfī* tidak dapat berhenti pada perdebatan sah atau tidak sahnya akad menurut fikih. Pendekatan yang hanya menekankan keabsahan akad dapat mengabaikan persoalan perlindungan hukum yang muncul setelah akad berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pentingnya pembacaan integratif antara *fiqh al-munākahāt*, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan *fiqh al-wāqi'*.

Fiqh al-munākahāt Mazhab Hanafi menjelaskan dasar normatif mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan. *Qawā'id al-fiqhiyyah* membantu menimbang maslahat dan mafsadat dari praktik *zawaj 'urfī*. *Fiqh al-wāqi'* membantu membaca *zawaj 'urfī* dalam konteks realitas sosial Mesir modern. Dengan demikian, penelitian ini memberi implikasi bahwa fikih klasik tetap relevan dalam kajian hukum keluarga kontemporer apabila dibaca secara kontekstual dan diarahkan pada perlindungan pihak yang rentan.

7.2.2 Implikasi Yuridis

Secara yuridis, penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pembuktian dan perlindungan hukum. Dalam konteks Mesir, pencatatan melalui *ma'dhūn* dan akses terhadap *Mahākim al-Usrah* menjadi bagian dari sistem yang berfungsi melindungi hak-hak keluarga. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan hambatan pembuktian, terutama ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan.

Implikasi yuridis lainnya adalah perlunya memahami perbedaan antara keabsahan akad menurut fikih dan pengakuan administratif menurut negara. Akad dapat dipandang sah menurut konstruksi fikih tertentu, tetapi belum tentu cukup kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak apabila tidak memiliki bukti tertulis. Oleh karena itu, hukum positif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa akibat hukum perkawinan dapat dibuktikan dan dilaksanakan.

7.2.3 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan tidak semestinya dipandang sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak. Dalam praktik *zawaj 'urfī*, pihak yang paling sering mengalami kerugian adalah perempuan dan anak karena hak-hak mereka sangat bergantung pada bukti hubungan perkawinan atau hubungan nasab.

Penelitian ini juga memberi implikasi bagi lembaga hukum keluarga bahwa mekanisme korektif seperti *taṣādūq al-zawāj*, *ithbāt al-zawāj*, *taṭlīq*, dan *fasakh* perlu dipahami sebagai jalan perlindungan, bukan sebagai pembiaran terhadap perkawinan tidak tercatat. Mekanisme tersebut tetap penting, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar perkawinan dicatat secara resmi sejak awal.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan pelaku *zawaj 'urfi*, *hakim Mahākim al-Usrah*, *ma'dhūn*, atau pihak-pihak yang terdampak secara langsung di Mesir.

Kedua, pembahasan penelitian ini dibatasi pada konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta kaitannya dengan praktik *zawaj 'urfi* di Mesir. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas secara luas pandangan seluruh mazhab fikih atau perbandingan dengan praktik perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif dan konseptual terhadap hubungan antara legitimasi fikih, legalitas negara, dan perlindungan perempuan serta anak. Karena itu, penelitian ini belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan hukum positif Mesir dalam menyelesaikan perkara *zawaj 'urfi* di tingkat pengadilan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai analisis normatif-kontekstual. Penelitian lanjutan masih diperlukan, terutama melalui studi lapangan, wawancara, atau kajian komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik *zawaj 'urfi* dan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak di Mesir.

7.4 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, khususnya pasangan yang hendak menikah, pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga. Perkawinan yang hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi tidak dicatat secara resmi, dapat menimbulkan risiko hukum yang besar, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghindari praktik

perkawinan tidak tercatat dan menempatkan pencatatan sebagai kebutuhan penting dalam menjaga kepastian hukum.

2. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, perlu diberikan pemahaman yang seimbang mengenai hubungan antara keabsahan akad menurut fikih dan perlindungan hukum dalam negara modern. Penjelasan keagamaan tentang perkawinan sebaiknya tidak hanya menekankan sahnyanya akad, tetapi juga menekankan pentingnya pencatatan, bukti tertulis, tanggung jawab mahar, nafkah, nasab, dan perlindungan anak. Dengan demikian, pemahaman fikih dapat diarahkan pada kemaslahatan keluarga secara lebih utuh.
3. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga hukum keluarga, mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak dalam perkara perkawinan tidak tercatat perlu terus diperkuat. Hukum positif harus mampu memberi akses perlindungan kepada pihak yang dirugikan, tanpa pada saat yang sama melemahkan kewajiban pencatatan perkawinan. Penguatan peran *ma'dhūn*, *Mahākim al-Usrah*, dan mekanisme pembuktian tertulis menjadi penting agar perempuan dan anak tidak kehilangan akses keadilan.
4. Bagi lembaga peradilan keluarga, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan *zawaj 'urfī* perlu memperhatikan kerentanan perempuan dan anak. Dalam perkara nafkah, perceraian, nasab, waris, dan pencatatan kelahiran, pengadilan perlu memastikan bahwa prinsip perlindungan tidak dikalahkan oleh kelemahan posisi sosial dan ekonomi pihak yang mengajukan perkara. Akses hukum yang mudah, cepat, dan sensitif terhadap kerentanan perempuan-anak menjadi bagian penting dari perlindungan keluarga.
5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian tentang *zawaj 'urfī* masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi kepustakaan, sehingga penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan empiris atau studi lapangan untuk melihat secara langsung praktik *zawaj 'urfī*, pengalaman perempuan, pengalaman anak,

serta cara pengadilan keluarga Mesir menangani perkara perkawinan tidak tercatat. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan *zawaj 'urfi* di Mesir dengan praktik nikah siri atau perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain, termasuk Indonesia.

6. Bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, pengalaman Mesir dapat menjadi bahan refleksi. Praktik *zawaj 'urfi* di Mesir menunjukkan bahwa keabsahan akad menurut fikih perlu dihubungkan dengan kebutuhan pencatatan, pembuktian, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi rujukan dalam memperkuat pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk melindungi perempuan, anak, dan kepastian hukum keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *zawaj 'urfi* harus dipahami secara seimbang antara fikih, hukum positif, dan realitas sosial. Mazhab Hanafi memang memberi ruang fleksibilitas dalam konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Namun, fleksibilitas tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa akad yang memiliki legitimasi keagamaan juga memiliki kekuatan hukum dan mampu melindungi hak-hak keluarga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
 Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 17 Mei 1996
 Alamat : Jl. KHM Manyur Gg. 2 No. 24, Kel. Bendan
 Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
 Telepon/WA : 082111860114
 Email : haidarsyn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah
2002-2008	SD Islam Keron 01 Pekalongan
2008-2010	Mts Al-Hikmah 02 Brebes
2010-2011	SMP Salafiyah Pekalongan
2011-2014	MA. Madrasatul Quran Tebuireng
2014-2015	Dar el Lughoh Syaikh Zaed
2015-2020	Univ. Al-Azhar Syarif
2020-2024	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2024-2026	Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi
2008-2010	Osis Divisi Pendidikan MTs Al-Hikmah 02
2014-2016	LSBNU PCINU Kairo
2016-2017	LSMNU PCINU Kairo
2016-2017	Divisi Infokom TC (Tebuireng Kairo)
2016-2017	Divisi Seni KSW Mesir (Kelompok Studi Walisongo)
2017-2018	BPH Sekretaris KSW Mesir (Kelompok Studi Walisongo)

Pengalaman Kerja

Tahun	Tempat
2015-2018	F&B RM. La Tansa
2016-2017	Call Center Western Union, Boulaq, Tahrir
2018-2020	Frelancer Owner Jasa Servis PC, Hp dan Elektronik
2021-2022	Pengajar Ma'had Aly Walindo Siwalan Pekalongan
2024-.....	Ower Harfa Outfit, Mahmud Tobacco & Coffee Batang

Karya Ilmiah

Tahun	Judul
2024	Risywah Dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Fath Al-Qadir)
2025	Jurnal Sinta 5, "Perkawinan yang Tidak Tercatat (Kawin Siri) dalam Perspektif Hukum Negara dan Fatwa Islam di Indonesia dan Mesir

Prestasi

Tahun	Judul
2025	Best Presenter - Honorable Mention III at the 8th International Conference on Islamic Studies (ICIS) Graduate Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 28 Juni 2026



Haidar Ali Mahmud Desky

NIM. 50124011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajeen Kab. Pekalongan 51161 Telp. (0285) 412575
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HAIDAR ALI MAHMUD DESKY
NIM : 50124011
Jurusan/Prodi : MHKI
No. Hp : 082111860114

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ZAWAJ 'URFI: STUDI ATAS KONSEP WALI, MAHAR, DAN PUBLISITAS PERKAWINAN
DALAM MADZHAB HANAFI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI MESIR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026



Haidar Ali Mahmud Desky